



## GOVERNOR OF EAST JAVA

### NOTE OF RESPONSIBILITY OF THE GOVERNOR

DALAM RANGKA  
PENYAMPAIAN  
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN  
(LKPJ)  
GOVERNOR AT THE END OF THE 2011 BUDGET  
TO  
THE REGIONAL PEOPLE'S REPRESENTATIVE COUNCIL (DPRD)  
PROVINSI JAWA TIMUR

---

***Bismillahirrahmanirrahim,  
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,  
Salam sejahtera untuk kita semua,***

Yang saya hormati:

Saudara Ketua dan Para Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur,

Saudara Pimpinan dan Segenap Anggota Komisi/Fraksi DPRD Provinsi Jawa Timur,

Saudara Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta

Saudara Hadirin dan Undangan sekalian yang saya muliakan,

Mengawali sidang paripurna mengenai penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2011, pertama marilah kita memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahuwata'Ala, karena atas rahmat, hidayah dan Ridho-Nya semata kita semua masih diberikan kesempatan dan kemampuan untuk melanjutkan pengabdian kepada masyarakat Jawa Timur dalam rangka memberikan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan yang lebih baik.

***Sidang Dewan dan Hadirin Yang Saya Hormati,***

Sebelum saya sampaikan substansi tentang Nota Pengantar LKPJ tahun 2011 ini, perlu saya sampaikan isu strategis terkini yang memerlukan perhatian kita semua yaitu rencana Pemerintah yang akan menaikkan harga BBM baik Premium maupun Solar dan saat ini sedang dalam proses politik

pembahasan RUU APBN Perubahan 2012 di DPR RI. Yang terpenting bagi kita baik saya selaku Gubernur dan DPRD sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, kita harus segera mengambil langkah-langkah antisipatif menyamping proses pembahasan RUU APBN Perubahan 2012 sedang berjalan.

Berbagai hal telah kita lakukan terkait rencana pemerintah yang akan menaikkan harga BBM. Saya telah mengidentifikasi berbagai bidang yang perlu mendapatkan perhatian serius yaitu (1) Inflasi, (2) Kemiskinan, (3) Advokasi berupa sosialisasi kepada seluruh masyarakat terhadap rencana kebijakan pemerintah, (4) Dampak terhadap keamanan, ketertiban, ketentraman serta persoalan hukum bagi oknum masyarakat yang menimbulkan distorsi. Tentang langkah-langkah dimaksud secara teknis telah dilakukan koordinasi dengan semua

instansi/lembaga antara lain Pertamina, POLDA, KODAM, KOARMATIM, Organisasi Keagamaan, Organda, Perguruan Tinggi, serta adik-adik kita Badan Eksekutif Mahasiswa.

Disamping itu, Saya telah pula bersama Forum Pimpinan Daerah melakukan komunikasi dengan jajaran Pemerintah Kabupaten/Kota melalui teleconference. Kesemuanya kita lakukan hanya satu tujuan yaitu untuk masyarakat Jawa Timur yang kita cintai bersama.

Berikutnya, yang terpenting pula jika kebijakan Pemerintah nantinya akan ditetapkan dan berpengaruh terhadap fiskal atau APBD Provinsi tahun 2012 akibat kenaikan BBM maupun TDL, maka Perubahan APBD tahun 2012 mohon dapat dikaji untuk dilaksanakan secepatnya, hal ini akan sangat terkait dengan volume belanja maupun standar harga yang akan berpengaruh pada kontrak-kontrak

pekerjaan baik pengadaan barang maupun konstruksi.

***Sidang Dewan dan Hadirin Yang Berbahagia,***

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan bersama-sama dengan DPRD sebagai unsur Pemerintahan Daerah dan didukung oleh partisipasi seluruh pemangku kepentingan (*Stakeholders*), secara obyektif dilakukan untuk mewujudkan target-target kinerja agregat yang secara yuridis telah ditetapkan pada Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2009 tentang RPJMD 2009-2014, yaitu Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Penurunan Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Penurunan Disparitas Wilayah di Jawa Timur serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Sinergitas pemerintahan daerah dengan pemangku kepentingan didukung dengan

pengarusutamaan (*mainstreaming*) partisipatoris, memanusiakan manusia (*people centered development*) akan memperkuat pencapaian tujuan (*objective*) pembangunan daerah.

Konstruksi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan panduan RPJMD tahun 2009-2014 yang dijabarkan pada perencanaan tahunan berupa RKPD, dilakukan melalui proses derivasi visi – misi ke struktur agenda dan prioritas pembangunan yang dipertajam melalui strategi berupa kebijakan, program dan rencana kegiatan.

Strategi prioritisasi dalam setiap rencana tahunan dengan potensi sumberdaya publik yang terbatas, diarahkan agar mampu memobilisasi potensi sumberdaya masyarakat, dimaksudkan untuk mengoperasionalkan setiap tema pembangunan tahunan RKPD dalam rangka pencapaian kinerja

agregat yang telah ditetapkan pada RPJMD tahun 2009-2014.

***Pimpinan Sidang dan Segenap Anggota Dewan  
Yang Terhormat,***

Penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2011 baik mengenai urusan desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan maupun urusan bersama telah selesai dilaksanakan. Oleh karena itu, sebagaimana Pasal 17 Ayat-1 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 bahwa paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, Gubernur agar menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD. Karenanya dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD merupakan wujud ketaatan dan kepatuhan terhadap asas tertib penyelenggaraan negara,

keterbukaan serta akuntabilitas dalam rangka mematuhi kewajiban Pasal 27 Ayat-2 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Konstruksi akuntabilitas LKPJ dimaksud, secara terstruktur yuridis merupakan laporan pertanggungjawaban kepada DPRD atas pelaksanaan perencanaan dan penganggaran pembangunan tahunan daerah. Hal ini sesuai dengan apa yang ditegaskan dalam Pasal 33 Ayat-1 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 3 Ayat-3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Pasal 2 huruf i Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Implementasi dari konstruksi yuridis LKPJ tahun 2011 merupakan kinerja atas pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pembangunan daerah sebagaimana Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun



2010 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2011.

Atas dasar RKPD 2011 dimaksud, selanjutnya dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2011.

Selanjutnya secara normatif KUA dan PPAS APBD 2011 dipergunakan sebagai input dalam penyusunan RAPBD 2011 yang sebelumnya atas aturan tata tertib DPRD dilakukan pembahasan bersama dengan DPRD untuk menetapkan Perda tentang APBD 2011 dan Penjabaran APBD melalui Peraturan Gubernur.

Untuk LKPJ tahun 2011, maka pada bagian hilir dokumen untuk mengoperasionalkan pelaksanaan program dan pembangunan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang APBD Provinsi

Jawa Timur Tahun Anggaran 2011, yang selanjutnya dilakukan penjabaran dan ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2010 tentang Penjabaran APBD Provinsi Jawa Timur TA.2011, serta Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur TA. 2011 dan Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2011 tentang Penjabaran Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur TA.2011.

***Pimpinan Sidang dan Segenap Anggota Dewan  
Yang Terhormat,***

Perlu kami informasikan bahwa laporan pertanggungjawaban kami susun dalam 3 (tiga) jenis buku yaitu **Pertama, Buku Nota Pertanggungjawaban,** merupakan uraian laporan mengenai catatan penting terkait implementasi

kebijakan prioritas pembangunan beserta capaian kinerjanya.

**Kedua, Buku Substansi Laporan Pertanggungjawaban,** merupakan uraian laporan pertanggungjawaban secara keseluruhan mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah di Jawa Timur tahun 2011.

**Ketiga, Buku Lampiran,** merupakan uraian laporan pendukung mengenai Capaian Kinerja Program/Kegiatan Pembangunan tahun 2011 sebagai satu kesatuan dengan buku laporan pertanggungjawaban yang berupa matriks capaian kinerja yang mengacu pada format 8 kolom UKP4 (Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan).

Ketiga buku laporan pertanggungjawaban tersebut, secara keseluruhan telah kami kirimkan kepada Segenap Anggota Dewan Yang Terhormat

sebelum agenda sidang paripurna ini berlangsung. Masing-masing Anggota Dewan memperoleh 3 (tiga) buku, dengan harapan dapat digunakan sebagai bahan pembahasan internal untuk memberikan tanggapan-tanggapan yang disampaikan dalam sidang paripurna selanjutnya.

Dalam agenda penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban tahun 2011, izinkan saya membacakan Nota Pertanggungjawaban sebagai pengantar terhadap seluruh substansi laporan pertanggungjawaban atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Jawa Timur. Khususnya terkait dengan implementasi pelaksanaan program dan prioritas pembangunan yang dibiayai dana APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2011, dalam rangka fasilitasi maupun stimulasi pencapaian Kinerja Utama RPJMD 2009-2014 Jawa Timur, baik melalui kerangka anggaran maupun kerangka regulasi.

Namun sebelumnya, perlu kami sampaikan penjelasan terlebih dahulu bahwa kondisi keuangan yang dilaporkan pada bulan Maret 2012 ini adalah kondisi *Un-Audited*. Hal ini mohon dapat dimaklumi mengingat laporan yang *Audited* oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur baru diselesaikan pada bulan Mei 2012. Dan sesudahnya akan dipertanggungjawabkan secara tersendiri kepada DPRD Provinsi Jawa Timur melalui Sidang Paripurna mengenai Penyampaian Laporan atas Pelaksanaan APBD Provinsi Tahun 2011.

Selanjutnya, kami sampaikan pula bahwa Nota Pertanggungjawaban Tahun 2011 yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini, tentu saja belum mencakup laporan pertanggungjawaban kami secara keseluruhan. Substansi yang akan saya sampaikan disini merupakan representasi dari prioritas program dan kegiatan dalam mendukung

pencapaian Kinerja Utama RPJMD tahun 2009-2014 pada tahun ketiga 2011. Sedangkan, laporan secara keseluruhan pada LKPJ merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Nota Pengantar ini.

***Segenap Anggota Dewan Yang Terhormat,***

Sebagaimana telah kami uraikan pada dokumen tahunan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah di Jawa Timur tahun 2011 merupakan upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mengatasi beberapa permasalahan utama antara lain: Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan, Kemiskinan, Kesenjangan dan Pengangguran, Percepatan Pembangunan Ekonomi yang berkualitas dan Pembangunan Infrastruktur, Kualitas Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup , Ketimpangan Wilayah, Bencana Alam, Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Penegakan Supremasi Hukum dan HAM serta

Ketentraman dan Ketertiban dan juga Terbatasnya Sumber Pembiayaan Pembangunan.

Dalam upaya mengatasi permasalahan utama tersebut, secara operasional dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2011 didukung dengan fasilitasi dan stimulasi dari APBD Provinsi Jawa Timur dengan jumlah total sebesar 12 Trilyun 305 Milyar 791 Juta 486 Ribu 188 Rupiah.

Dari kekuatan anggaran tersebut, dialokasikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah Jawa Timur tahun 2011 untuk pos Belanja Tidak Langsung sebesar 6 Trilyun 745 Milyar 75 Juta 627 Ribu 825 Rupiah dan Belanja Langsung sebesar 5 Trilyun 560 Milyar 715 Juta 858 Ribu 363 Rupiah.

Alokasi Belanja Tidak Langsung meliputi Belanja Pegawai baik Gaji PNS dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP), Belanja Bunga, Belanja Hibah,

Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa serta Belanja Tidak Terduga. Sedangkan, Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai terkait dengan kegiatan, belanja barang dan jasa yang didalamnya terdapat belanja barang yang diberikan kepada masyarakat (modal non aset) maupun belanja modal.

Dari Keseluruhan alokasi belanja daerah tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan kebijakan pembangunan di Provinsi Jawa Timur telah terealisasi sebesar 11 Trilyun 856 Milyar 534 Juta 884 Ribu 8 koma 20 Rupiah yang dilaksanakan melalui strategi pembangunan baik *Pro Poor, Pro Job, Pro Growth, Pro Gender maupun Pro Environment*.

Secara tematik, yang didasarkan atas fakta empiris kinerja pembangunan tahun 2010, tantangan,



peluang dan hambatan serta fakta keterbatasan belanja publik, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan tema dokumen RKPD Tahun 2011 yaitu **“Pemerataan Pembangunan dan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Didukung Pemantapan Tata Kelola Kepemerintahan dalam rangka Mewujudkan Kemakmuran yang Lebih Baik”**.

Dari konstruksi tema RKPD 2011 dimaksud, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan daerah baik urusan Desentralisasi, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan maupun Urusan Bersama di Jawa Timur tahun 2011 telah dilaksanakan dengan kinerja yang akan saya sampaikan pada bagian lain pengantar LKPJ ini.

***Sidang Dewan Yang Terhormat,*** selanjutnya kami sampaikan secara garis besar Nota Pertanggungjawaban tahun 2011 yang kami uraikan

kedalam 2 (dua) bagian. **Bagian Pertama**, mengenai Capaian Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka, Jumlah Penduduk Miskin, Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Disparitas Wilayah dan Indeks Pembangunan Manusia, dan **Bagian Kedua**, mengenai Penerimaan Penghargaan.

Laporan selengkapnya kami sampaikan sebagai berikut:

**Bagian Pertama**, mengenai Capaian Kinerja Program/Kegiatan yang Mendukung Capaian Kinerja 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU) Jawa Timur sebagai berikut:

**KESATU**, CAPAIAN KINERJA TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)

Pelaksanaan pembangunan ketenagakerjaan pada 2011 dihadapkan pada berbagai persoalan antara lain masalah Kesempatan Kerja, Kualitas Sumber Daya Manusia, Relevansi Pendidikan dengan

Ketersediaan Lapangan Kerja, Informasi Pasar Kerja dan Efektifitas Bursa Kerja, Persoalan TKI/TKW yang Dipulangkan ke Indonesia.

Dalam upaya mengatasi persoalan ketenagakerjaan dimaksud, maka upaya yang dilakukan bermuara pada penurunan TPT, baik melalui program-program pembangunan ekonomi maupun program eksplisit ketenagakerjaan.

Program pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang mampu meningkatkan percepatan pertumbuhan sebesar 7,22 persen, telah dibangun oleh 9 sektor lapangan usaha baik oleh segmen mikro, kecil, menengah dan besar. Secara terstruktur pembangunan ekonomi di Jawa Timur didasarkan atas peningkatan kinerja sektor riil dan tidak bertumpu pada sektor portofolio, sehingga kualitas pertumbuhan ekonomi korelatif dengan kinerja TPT.

Secara terstruktur nomenklatur, berbagai persoalan tenaga kerja di Jawa Timur tahun 2011, dilaksanakan melalui Agenda Utama Pembangunan yaitu **“Memperluas Lapangan Kerja, Meningkatkan Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan, Memberdayakan Ekonomi Rakyat, terutama Wong Cilik, dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Rakyat”**.

Dalam rangka melaksanakan agenda utama pembangunan ketenagakerjaan guna mengatasi kelima persoalan ketenagakerjaan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan berbagai program prioritas, dan hasilnya selama kurun waktu satu tahun dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 dapat digambarkan sebagai berikut:

***Pertama***, Program Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja melalui penempatan dari sektor

ketenagakerjaan menunjukkan bahwa terjadi peningkatan angka penempatan yang cukup signifikan selama 3 (tiga) tahun terakhir.

Kontribusi penempatan dari sektor ketenagakerjaan disumbang melalui penempatan Antar Kerja Lokal (AKL) yaitu penempatan tenaga kerja yang ada di Kabupaten/Kota dan Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) yaitu penempatan tenaga kerja Antar Daerah Provinsi serta Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Negara (AKAN) yaitu penempatan tenaga kerja di luar negeri dan juga Penempatan Antar Kerja Khusus (AKSUS) yaitu penempatan tenaga kerja berkebutuhan khusus.

Pada tahun 2010 – 2011 angka penempatan tenaga kerja secara umum naik sebesar 62,25 persen dari tahun 2010 sebanyak 201 Ribu 839 orang menjadi 327 Ribu 489 orang pada tahun 2011.

Kenaikan jumlah penempatan tenaga kerja ini, masing-masing memberikan kenaikan kontribusi dari tahun 2010 ke tahun 2011 sebagai berikut : Penempatan Antar Kerja Lokal (AKL) naik sebesar 105,38 persen (termasuk tenaga kontrak sebesar 34 persen), Penempatan Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) naik sebesar 49,66 persen (termasuk program transmigrasi sebesar 26,69 persen), dan penempatan tenaga kerja Antar Kerja Antar Negara (AKAN) naik sebesar 64,31 persen.

Bertumpu pada hasil peningkatan penempatan tenaga kerja tersebut di atas, Pemerintah Provinsi Jawa Timur senantiasa terus melaksanakan perluasan jejaring informasi lowongan kerja di berbagai media untuk : Penempatan kerja di sektor formal, Pelaksanaan JMF/*JOB MARKET FAIR* (bursa kerja terbuka). Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja secara *online* melalui website [www.infokerja-](http://www.infokerja-)

jatim.com untuk mengoptimalkan penyerapan lowongan kerja di pasar kerja.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga berupaya untuk mengoptimalkan operasionalisasi Bursa Kerja Khusus (BKK) di 16 UPT Pelatihan Kerja melalui pengembangan koneksitas bursa kerja *online* guna memaksimalkan penempatan siswa UPT Pelatihan Kerja di pasar kerja.

**Kedua**, Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, melalui Pengembangan BLK bertaraf internasional untuk menghasilkan calon tenaga kerja profesional yang mampu bersaing baik di pasar kerja dalam negeri maupun luar negeri.

Pada tahun 2011 telah dirintis pengembangan 9 UPT Pelatihan Kerja bertaraf internasional di Surabaya, Singosari, Jember, Kediri, Tuban, Mojokerto, Jombang, Pasuruan dan Sumenep.

Sementara itu, secara bertahap akan diwujudkan 16 BLK bertaraf internasional hingga tahun 2014.

***Ketiga***, Program Pengawasan Ketenagakerjaan dan Perlindungan Tenaga Kerja, melalui Gelar Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Ketenagakerjaan dan Pembentukan Satgas Pembinaan TKI untuk mengurangi pengiriman TKI ilegal serta peningkatan pelayanan dan profesionalisme Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS).

***Keempat***, Program Hubungan Industrial dan Perbaikan Syarat Kerja, melalui Pembentukan Unit Reaksi Cepat (URC) dan Deteksi Dini Pencegahan dan Penanganan Masalah Hubungan Industrial untuk menangani dan mencegah permasalahan perselisihan hubungan industrial secara cepat, tepat dan tidak berdampak. Untuk itu, URC berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Pegawai Teknis Setempat sesuai prosedur dan kewenangan masing-masing.



Pembentukan URC ini bertujuan untuk memasyarakatkan pelaksanaan hubungan industrial dan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan di perusahaan-perusahaan termasuk pemetaan perusahaan yang rawan konflik.

Dari hasil pemetaan perusahaan tahun 2010 tercatat sebanyak 592 Kasus Hubungan Industrial di Jawa Timur, tetapi tahun 2011 turun menjadi 382 Kasus, yang berarti berkurang sebanyak 210 Kasus (35,47 persen). Sedangkan, Unjuk Rasa tahun 2010 sebanyak 56 Kejadian, dan tahun 2011 sebanyak 31 Kejadian jadi menurun sebanyak 25 Kejadian (44,64 persen).

Dari pelaksanaan Program-program pembangunan ekonomi maupun program – program yang secara nomenklatur dilaksanakan oleh SKPD bidang urusan Ketenagakerjaan, dari Jumlah Penduduk Jawa Timur berdasarkan hasil Sensus oleh

BPS tahun 2010 sebesar 37 Juta 476 Ribu 11 jiwa dan pada bulan Agustus 2011 tercatat sebanyak 19 Juta 761 Ribu 886 orang angkatan kerja. Dari angkatan kerja yang ada, jumlah penduduk yang bekerja sebesar 18 Juta 940 Ribu 340 orang (95,84 persen).

Sementara pencari kerja yang tidak/belum terserap di pasar kerja sebesar 821 Ribu 546 orang. Capaian kinerja TPT pada 2011 posisi Agustus 2011 mencapai 4,16 persen. Kondisi ini relatif lebih baik dibandingkan tahun 2010 yakni sebesar 828 Ribu 943 orang atau TPT sebesar 4,25 persen.

Dengan demikian, maka kinerja penurunan TPT (*effort*) sejak 2010 ke 2011 terjadi penurunan TPT sebesar 0,09 poin dari tahun 2010. Dan apabila dibandingkan dengan target RPJMD, maka Penurunan TPT pada tahun 2011 melampaui target RPJMD

Provinsi Jawa Timur yang ditetapkan sebesar 5,8 persen – 6,0 persen.

Dengan demikian, secara umum dapat dimaknai bahwa penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka Jawa Timur tahun 2011 sebesar 4,16 persen turun bila dibanding tahun 2010 sebesar 4,25 persen, itu artinya bahwa pada tahun 2010 setiap 10.000 orang angkatan kerja masih terdapat pengangguran sebanyak 425 Orang dan pada tahun 2011 berkurang menjadi sebanyak 416 Orang.

Kedepan, atas dukungan DPRD Jawa Timur dan partisipasi seluruh masyarakat maupun dunia usaha akan semakin kita percepat, meskipun situasi ekonomi global masih melambat serta kondisi dalam negeri yang memerlukan perhatian serius dari kita semua.

***Sidang Dewan Yang Terhormat, berikutnya:***

**KEDUA,** CAPAIAN KINERJA JUMLAH PENDUDUK MISKIN TERHADAP TOTAL PENDUDUK JAWA TIMUR

Permasalahan kemiskinan merupakan tantangan utama pembangunan Jawa Timur dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Masih tingginya angka kemiskinan Jawa Timur dibanding nasional menunjukkan bahwa permasalahan kemiskinan harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan pembangunan di Jawa Timur.

Tingginya angka kemiskinan di Jawa Timur sebagai permasalahan utama disebabkan oleh beberapa hal yaitu 1) Masih kurang sinerginya program pengentasan kemiskinan antar level pemerintahan (di Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota); 2) Kultur masyarakat; 3) Masih rendahnya aksesibilitas masyarakat terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan

pekerjaan serta kendala geografis; 4) Masih terbatasnya infrastruktur ekonomi dan sosial di pedesaan.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah berupaya untuk menangani permasalahan kemiskinan tersebut dengan merumuskan Agenda Utama Pembangunan yang harus dilaksanakan sampai dengan tahun 2014 yaitu **“Memperluas Lapangan Kerja, Meningkatkan Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan, Memberdayakan Ekonomi Rakyat, Terutama Wong Cilik, dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Rakyat”**.

Agenda tersebut saling terkait satu sama lain dimana perluasan lapangan kerja akan meningkatkan pendapatan bagi penduduk miskin, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Terkait penanggulangan kemiskinan, kebijakan pemerintah provinsi Jawa Timur tahun 2011 diarahkan untuk meningkatkan upaya dan efektivitas penanggulangan kemiskinan di wilayah pedesaan maupun perkotaan dengan menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin yang meliputi hak atas pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, tanah, lingkungan hidup dan sumber daya alam, rasa aman, serta hak publik.

Berdasarkan data BPS Jawa Timur, tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Timur selama tiga tahun terakhir mengalami penurunan. Pada tahun 2009 tingkat kemiskinan sebesar 16,68 persen menurun menjadi sebesar 15,26 persen pada tahun 2010. Kemudian, pada tahun 2011, tingkat kemiskinan sebesar 14,23 persen. Hal ini berarti telah terjadi

penurunan sebesar 1,03 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Indikator kinerja utama tingkat kemiskinan pada tahun 2011 sebesar 14,23 persen tersebut lebih baik dari target yang ditetapkan RPJMD sebesar 15,00 persen – 15,50 persen. Penurunan tersebut mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Jawa Timur.

Pencapaian angka kemiskinan pada tahun 2011 tersebut lebih baik dibandingkan tahun–tahun sebelumnya. Gambaran pencapaian sasaran secara umum dalam penanggulangan kemiskinan adalah menurunnya Persentase Penduduk yang Berada Dibawah Garis Kemiskinan berarti menurunnya angka Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*).

Kedua ukuran ini dapat membantu mengetahui keberhasilan pengentasan kemiskinan dan kemajuan penanggulangan kualitas kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks, dengan hanya berpedoman pada salah satu ukuran saja misalkan persentase penduduk miskin dirasakan tidak mencukupi. Agar pengetahuan akan kemiskinan semakin obyektif, diperlukan ukuran lain yang dipandang perlu yaitu tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahannya Kemiskinan menunjukkan tren penurunan dalam kurun waktu 4,5 tahun ini. Pada Maret 2011, angka Kedalaman Kemiskinan sebesar 2,27 turun menjadi 2,00 pada September 2011.

Sementara itu pada waktu yang sama, angka keparahan kemiskinan sebesar 0,54 turun menjadi



0,46. Kedua nilai indeks yang semakin menurun tersebut, memberikan indikasi rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin mengecil.

Penurunan Kemiskinan secara langsung maupun tidak langsung merupakan dampak dari kebijakan prioritas pembangunan antara lain melalui : BOSDA-MADIN, JALIN KESRA RTSM, JAMKESDA, PONKESDES, Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Rumah Hijau; Bantuan sosial terpadu berupa integrasi program-program perlindungan sosial berbasis keluarga seperti : Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan, Jamkesmas, Beasiswa anak keluarga miskin, PNPM Mandiri, pemenuhan BLM 3 miliar/kecamatan untuk minimal 30 persen kecamatan termiskin & integrasi PNPM pendukung; Kredit Usaha Rakyat dan

Kredit untuk TKI Jawa Timur; serta Transmigrasi keluarga miskin.

Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat selain ditandai semakin menurunnya angka kemiskinan di Jawa Timur, juga ditandai peningkatan taraf kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui program Pelayanan dan rehabilitasi sosial serta serangkaian program bantuan dan perlindungan sosial terhadap 290 Ribu 562 PMKS pada tahun 2010 dan sebanyak 291 Ribu 110 PMKS pada tahun 2011, yang terdiri atas Pelayanan sosial bagi anak dan Lanjut usia terlantar, Rehabilitasi sosial bagi WTS, Gelandangan pengemis, Orang dengan kecacatan, dan Orang Terlantar.

Dalam upaya untuk mengatasi kemiskinan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melaksanakan program prioritas yaitu Program Jalinkesra. Sasaran

Program JALIN KESRA ini diarahkan untuk Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM).

Program ini dirancang sebagai program keberpihakan terhadap orang miskin (*pro poor*) yang fokus utamanya adalah memberikan bantuan terhadap Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), dimana penentuan sasarannya didasarkan pada data PPLS 2008 *by name by adress* dari Badan Pusat Statistik dan berbasis Nomor Identitas (ID).

Pemberian bantuan Program Jalin Kesra dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu untuk RTSM yang produktif dan RTSM non produktif (kelompok jompo dan penyandang cacat ganda/*difabel*).

Jenis bantuan untuk RTSM Produktif adalah barang produktif yang dibagi dalam 6 Paket, yaitu: Paket Peternakan, Paket Pertanian, Paket Perikanan, Paket Koperasi dan UKM, Paket Perdagangan dan Perindustrian, dan Paket Perkebunan.

Jenis bantuan untuk kelompok RTSM Non Produktif adalah berupa Bantuan Beras 20 Kg dan Uang Lauk pauk Rp.150.000,- per bulan selama 1 tahun.

Pelaksanaan Program Jalin Kesra yang diperuntukkan bagi 493.004 RTSM, pada tahun 2010, telah menjangkau sejumlah 69.685 RTSM. Sedangkan, untuk pelaksanaan Jalin Kesra tahun 2011 telah terealisasi menjangkau 92.655 RTSM, dan untuk tahun 2012 direncanakan akan menjangkau 92.529 RTSM.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Program Jalin Kesra, RTSM telah dapat merasakan manfaat dari bantuan yang telah diterimanya, sehingga mereka memiliki harapan untuk meningkatkan kesejahteraannya dan yang lebih penting mereka merasa “diorangkan”. Hal ini disebabkan karena Program Jalin Kesra dilakukan dengan prinsip partisipatoris, dimana orang miskin diberi bantuan

sesuai dengan permintaan dan kebutuhan mereka sendiri.

Yang perlu difahami oleh kita bersama adalah bahwa program ini merupakan amanat Undang-Undang yang harus dilakukan dengan “hati” dan tidak bisa hanya diukur dari aspek efisiensi anggaran semata.

Upaya untuk menurunkan kemiskinan lainnya adalah melalui upaya peningkatan akses penduduk miskin dan kurang mampu pada pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin melalui program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA). Pelayanan JAMKESDA dapat diperoleh di Puskesmas dan jaringannya serta ruang rawat inap kelas III Rumah Sakit secara gratis.

Jumlah cakupan Jamkesda pada tahun 2011 yaitu sebesar 1 Juta 257 Ribu 572 orang dengan

realisasi Dana Sharing sebesar 171 Milyar 989 Juta 782 Ribu 363 Rupiah.

Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) telah menyepakati mekanisme Dana Sharing untuk menjamin Pelayanan Kesehatan bagi penduduk Maskin non Kuota pada Puskesmas dan RS Kabupaten/Kota serta di kelas III Rumah Sakit Pemerintah Provinsi yaitu: RS Dr. Soetomo, RS Haji, RS Syaiful Anwar, RS Dr. Soedono, RS Jiwa Menur dan di RSUD Kabupaten/Kota, serta UPT Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang meliputi RS Kusta (Sumber Glagah Mojokerto dan Kota Kediri), RS Paru (Batu, Jember, Madiun), BKMM dan BP4 (Surabaya, Pamekasan, Madiun).

Disamping itu, dalam rangka mendukung pengentasan kemiskinan, mulai tahun 2009 telah melaksanakan pemugaran RTLH sebanyak 20.000 unit di Kabupaten Banyuwangi, Bojonegoro, Jombang,

Lumajang, Pasuruan, Madiun, Magetan, Ngawi, Ponorogo dan Tuban.

Sementara itu, pada Tahun Anggaran 2010 sebanyak 15.000 unit di Kabupaten Mojokerto, Kediri, Sidoarjo, Blitar, Tulungagung, Nganjuk, Lamongan, Malang, Gresik dan Madiun. Sedangkan, pada tahun 2011 sebanyak 15.000 unit di Kabupaten Pasuruan, Blitar, Malang, Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi, Bangkalan, Sumenep, Pamekasan dan Sampang.

Total untuk kegiatan Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni mulai tahun 2009 s/d 2011 sebanyak 50 Ribu unit tersebar di 31 Kab/Kota di Jawa Timur. Sebagaimana kita ketahui bahwa anggaran Rehabilitasi RTLH per unit sebesar 5 Juta Rupiah, sehingga total alokasi anggaran sebesar 250 Milyar Rupiah.

Prosentase penurunan kemiskinan sebagaimana telah digambarkan sebelumnya, juga merupakan hasil kontribusi dari program penempatan penduduk miskin Jawa Timur di lokasi tujuan transmigrasi di luar Jawa.

Setiap penduduk miskin dari Jawa Timur di berikan fasilitas berupa rumah dengan status hak milik untuk tempat tinggal beserta sebidang tanah perkarangan serta diberikan lahan untuk usaha, sehingga dari fasilitas yang diberikan diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya.

Dalam pelaksanaan program ini, pada tahun 2011 ditargetkan penempatan penduduk melalui transmigrasi sebanyak 1.034 KK. Sampai dengan akhir tahun 2011 telah terealisasi sebanyak 851 KK (82,30 persen), sedangkan sisanya 183 KK (17,70



persen) akan ditempatkan melalui **“Program Luncuran 2012”**.

***Pimpinan Dewan dan Segenap Anggota Dewan Yang Terhormat,***

**KETIGA, CAPAIAN KINERJA PERTUMBUHAN EKONOMI**

Kinerja ekonomi Jawa Timur sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 mengalami percepatan diatas rata-rata nasional, yang berturut-turut adalah 5,01 persen, 6,68 persen dan 7,22 persen. Dan bahkan pertumbuhan tahun 2011 ini adalah yang paling cepat di Pulau Jawa dan diatas rata-rata nasional 6,5 persen dengan nilai absolut PDRB atas dasar harga berlaku mencapai 844 trilyun rupiah lebih. Capaian tersebut sangat baik dalam konteks makro ekonomi, karena inflasi kumulatif tahun 2011 mencapai 4,09 persen. Dibanding dengan tahun

sebelumnya, kinerja pertumbuhan tahun 2011 ini lebih baik karena percepatan pertumbuhan ekonomi juga diiringi dengan penurunan inflasi sebesar 1,07 persen dimana inflasi kumulatif tahun 2010 mencapai 6,96 persen.

Dari kinerja ekonomi dimaksud, struktur ekonomi Jawa Timur masih didominasi oleh 3 sektor utama, yaitu pertanian 15,39 persen yang tumbuh 2,53 persen, industri pengolahan 27,13 persen yang tumbuh 6,06 persen dan perdagangan, hotel dan restoran 30,00 persen yang tumbuh 9,81 persen. Dari aspek sumber pertumbuhan terbesar berasal dari pertumbuhan sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 3,04, persen pertumbuhan sektor industri pengolahan sebesar 1,54 persen dan pertumbuhan sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 0,84 persen.

Selanjutnya berdasarkan penggunaan, struktur ekonomi Jawa Timur masih didominasi oleh sektor konsumsi masyarakat 67,46 persen yang tumbuh 7,16 persen, Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 19,71 persen yang tumbuh 8,21 persen, Ekspor 49,76 persen yang tumbuh 10,67 persen, Impor 45,85 persen yang tumbuh 10,13 persen .

Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun 2011 sebesar 7,22 persen didukung oleh kinerja investasi dan perdagangan yang perkembangannya cukup baik. Perlu saya sampaikan bahwa kinerja investasi baik investasi non fasilitas maupun fasilitas baik PMA maupun PMDN baik kinerja ijin prinsip maupun realisasi investasi mengalami pertumbuhan yang signifikan. Sebagaimana diketahui bahwa untuk :

A. Ijin Prinsip, untuk Investasi PMA tahun 2010 sebesar 18,45 trilyun rupiah pada tahun 2011 meningkat menjadi 44,68 triliun rupiah,

sedangkan PMDN tahun 2010 sebesar 41,01 trilyun rupiah tahun 2011 mencapai 26,50 trilyun rupiah.

B. Realisasi Investasi, untuk investasi non fasilitas tahun 2010 sebesar 56,26 trilyun rupiah tahun 2011 meningkat menjadi 70,07 trilyun rupiah, PMA tahun 2010 sebesar 16,73 trilyun rupiah tahun 2011 meningkat menjadi 20,07 trilyun rupiah dan PMDN tahun 2010 sebesar 9,59 trilyun rupiah tahun 2011 meningkat menjadi 20,33 trilyun rupiah.

Dengan demikian secara total, kinerja ijin prinsip tahun 2010 sebesar 59,46 trilyun rupiah tahun 2011 meningkat menjadi 71,18 trilyun rupiah dan realisasi investasi tahun 2010 sebesar 82,58 trilyun rupiah tahun 2011 meningkat menjadi 110,47 trilyun rupiah.

Selanjutnya, untuk kinerja perdagangan mengalami surplus sebesar 34,58 trilyun rupiah dengan rincian sebagai berikut yaitu :

- A. Ekspor, untuk ekspor keluar provinsi sebesar 239,47 trilyun rupiah dan ekspor ke luar negeri sebesar 200,5 trilyun rupiah, sehingga total ekspor tahun 2011 sebesar 439,97 trilyun rupiah atau naik 17,27 persen dari tahun 2010.
- B. Impor, untuk impor dari luar provinsi 208,75 trilyun rupiah dan impor dari luar negeri 196,64 trilyun rupiah sehingga total impor tahun 2011 sebesar 405,39 trilyun rupiah atau naik 19,18 persen dari tahun 2010.

Perlu saya sampaikan bahwa struktur impor pada tahun 2011 adalah 83,88 persen merupakan bahan baku/penolong, 8,69 persen barang modal dan 7,43 persen merupakan barang konsumsi. Dari struktur dimaksud, pada tahun mendatang akan

terjadi proses *value added* dari pengolahan impor bahan baku maupun penolong dari proses industrialisasi di Jawa Timur. Dengan demikian, kedepan akan terjadi peningkatan nilai tambah bruto dalam konteks pertumbuhan PDRB.

Tentu dapat kita pahami bersama, bahwa kinerja dimaksud bukan hanya kinerja Pemerintah Provinsi, namun dengan strategi pertumbuhan dan sumberdaya terbatas, fokus pembangunan ekonomi diarahkan pada sektor ekonomi produktif khususnya untuk pelaku UMKM maupun dukungan pembangunan infrastruktur yang sampai saat ini terus kita upayakan percepatan penyelesaiannya.

***Sidang Dewan dan Hadirin Yang Terhormat,***

Secara sektoral, dapat kami jelaskan secara singkat berbagai upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan dukungan

penetapan APBD maupun PAPBD 2011 melalui berbagai fokus pembangunan.

Peningkatan peran Sektor Pertanian melalui program pemberian fasilitasi bantuan sarana produksi pertanian dan pengelolaan pasca panen dan peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM dan Koperasi melalui Jamkrida, Pembiayaan Linkage dan Apex Bank. Kemudian, peningkatan aksesibilitas aktivitas perekonomian dilakukan melalui pengembangan infrastruktur wilayah dan infrastruktur desa.

Infrastruktur wilayah telah dilakukan percepatan pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS), pembangunan Puspa Agro, dan Resi Gudang. Sedangkan, infrastruktur desa diarahkan pada pembangunan Jalan, Pengairan, dan Air Bersih.

Dilihat dari sisi percepatan pertumbuhan pada 3 sektor utama PDRB, Sektor Pertanian mengalami

percepatan pertumbuhan, yaitu dari 2,23 persen pada tahun 2010, meningkat menjadi 2,53 persen pada tahun 2011. Sektor Industri Pengolahan mengalami percepatan pertumbuhan dari 4,32 persen pada tahun 2010 menjadi 6,06 persen pada tahun 2011. Sedangkan, sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sedikit mengalami perlambatan pertumbuhan, yaitu dari 10,67 persen pada tahun 2010 menjadi 9,81 persen pada tahun 2011.

Sektor Pertanian merupakan sektor strategis, hal ini dapat dilihat dari kontribusinya terhadap perekonomian Jawa Timur, maupun dari sumbangannya terhadap ketersediaan pangan Nasional. Untuk produksi padi secara Nasional, Pemerintah Pusat menargetkan surplus 10 juta ton beras pada tahun 2014, yang mana dari jumlah tersebut 5 juta ton ditargetkan berasal dari surplus beras Jawa Timur.



Pada tahun 2011 produksi Padi Jawa Timur mengalami penurunan bila dibanding tahun 2010. Pada tahun 2010 produksi Gabah sebanyak 11 Juta 643 Ribu 773 ton atau 7 Juta 568 Ribu 452 ton setara beras, dan pada tahun 2011 turun menjadi sebanyak 10 Juta 576 Ribu 543 ton atau 6 Juta 874 Ribu 753 ton setara beras.

Hal ini disebabkan karena adanya anomali iklim yang berdampak timbulnya serangan hama penyakit pada tanaman padi, sehingga pada sebagian areal tanam mengalami gagal panen. Sungguhpun demikian, untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat Jawa Timur masih surplus sebanyak 3 Juta 409 Ribu 847 ton Beras.

Kedepan dalam rangka meningkatkan produksi pangan khususnya beras akan dilakukan berbagai upaya antara lain dengan meningkatkan infrastruktur pendukung, seperti optimalisasi jaringan irigasi

dengan peningkatan Operasi dan Pemeliharaan (OP) Jaringan Irigasi seluas 463 Ribu 222 hektar dan rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) seluas 11 Ribu 575 hektar, sehingga diharapkan dapat meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) dari 1,8 menjadi 2,3.

***Sidang Dewan dan Hadirin Yang Terhormat,***

Berkenaan dengan pengairan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah melakukan upaya preventif pengendalian banjir untuk mengamankan infrastruktur pengairan dan sumberdaya lahan, agar optimalisasi jaringan irigasi di Jawa Timur sesuai dengan yang diharapkan.

Dengan meningkatnya Indeks Pertanaman dan Perbaikan Sistem Usahatani mulai penanaman sampai dengan pengelolaan pasca panen diharapkan target surplus 5 Juta ton beras dapat tercapai.

Selanjutnya, untuk komoditas gula Jawa Timur, produksi pada tahun 2011 sebesar 1 Juta 51 Ribu 642 ton meningkat dibanding produksi tahun 2010 yaitu sebesar 1 Juta 14 Ribu 274 ton dan memberikan kontribusi 47 persen terhadap produksi Gula Nasional sebesar 2,23 Juta ton.

Kedepan Jawa Timur terus melakukan berbagai upaya dalam rangka peningkatan produksi dan mendukung pencapaian target swasembada gula Nasional pada tahun 2014, antara lain melalui penyiapan bibit unggul tebu dan pengembangan tebu dilahan kering.

Berikutnya, komoditas Tembakau, produksi tahun 2011 sebesar 114 Ribu ton, naik sebesar 93,22 persen dibanding produksi tahun 2010 sebesar 59 Ribu ton. Perlu saya sampaikan bahwa produk Tembakau Jawa Timur telah memberikan kontribusi

terhadap produksi Tembakau Nasional sekitar 50 persen.

Dibidang peternakan, produksi hasil peternakan di Jawa Timur terus mengalami peningkatan. Produksi Daging tahun 2010 sebesar 339 Ribu 55 ton, tahun 2011 meningkat menjadi 343 ribu 834 Ton, produksi Susu tahun 2010 sebesar 536 Ribu 588 ton, tahun 2011 meningkat menjadi 580 ribu 822 ton, dan produksi Telur pada tahun 2010 sebesar 257 Ribu 529 ton, tahun 2011 naik menjadi 285 ribu 993 ton. Terhadap ketiga komoditas tersebut untuk memenuhi konsumsi masyarakat Jawa Timur telah berlebih atau surplus.

Namun, Jawa Timur tetap berusaha untuk meningkatkan populasi ternak dan meningkatkan hasil produksi peternakan dalam rangka mendukung pencapaian swasembada daging Nasional tahun 2014.

Disisi lain, Pemerintah Provinsi merasa perlu untuk

melindungi peternak Jawa Timur dan menjaga stabilitas harga ternak dan produk peternakan, sehingga melarang importasi ternak khususnya sapi melalui pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya.

Produksi komoditas perikanan pada tahun 2011 mengalami peningkatan bila dibanding tahun 2010, yaitu produksi Perikanan Tangkap tahun 2010 sebesar 352 Ribu 776 ton pada tahun 2011 meningkat menjadi 389 Ribu 333 ton, dan produksi Perikanan Budidaya tahun 2010 sebesar 760 ribu 617 Ton menjadi 839 ribu 872 ton pada tahun 2011.

Berbagai upaya telah dilaksanakan dalam rangka peningkatan produksi Perikanan Tangkap, yaitu antara lain melalui peningkatan sarana-prasarana, restrukturisasi armada dan alat tangkap, restocking dan pengembangan kawasan minapolitan serta pemberdayaan usaha masyarakat perikanan dan kelautan.

Dalam rangka peningkatan nilai tambah dan peningkatan lapangan kerja telah dilakukan berbagai upaya pengembangan agro industri dan menumbuhkembangkan wirausaha baru berbasis agro sebanyak 1.250 unit yang menyerap sekitar 5.000 tenaga kerja, kemudian memberikan fasilitasi peningkatan nilai tambah kepada 12.110 IKM Berbasis Tebu, produk Olahan Buah, Hasil Laut dan Hasil Hutan.

Sementara, untuk peningkatan pemasaran dan daya saing agro, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah memfasilitasi pertemuan antara penyedia bahan baku industri agro dengan pelaku usaha melalui pasar lelang agro. Pada tahun 2011, pasar lelang dilaksanakan sebanyak 20 kali, yang diikuti oleh 3.800 orang.

***Sidang Dewan dan Hadirin Yang Terhormat,***

Dalam bidang perdagangan untuk peningkatan ekspor, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah memfasilitasi perdagangan Internasional melalui 30 kali pameran bertaraf internasional yang mengikut sertakan 279 Industri Kecil dan Menengah serta pameran internasional di 6 negara. Sementara untuk pengendalian impor, difokuskan pengendalian terhadap garam impor guna meningkatkan produksi dan kualitas garam Jawa Timur.

Selain Perdagangan Luar Negeri, Perdagangan Antar Provinsi juga memberikan sumbangan besar pada perekonomian Jawa Timur. Dalam rangka memperluas pasar nasional sejak tahun 2010, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah membuka 4 Kantor Perwakilan Dagang di 4 Provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Timur, yang kemudian pada tahun 2011 ditambah lagi menjadi 6 kantor

Perwakilan Dagang yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, Gorontalo dan Maluku, sehingga menjadi 10 Kantor Perwakilan Dagang.

Adanya pembukaan 10 kantor Perwakilan Dagang tersebut telah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap ekspor antar provinsi, dimana dari sebesar 239,47 triliun Rupiah yang berasal dari nilai perdagangan Antar Pulau, sekitar 42,73 persen dari jumlah tersebut merupakan kontribusi yang diperoleh dari perdagangan 10 Provinsi yang terdapat Kantor Perwakilan Dagang Jawa Timur.

Dalam rangka peningkatan kapasitas Koperasi UMKM di Jawa Timur, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan berbagai upaya pemberdayaan antara lain penambahan modal usaha bagi 1.000 Koperasi Wanita yang memiliki kinerja baik, Penyaluran belanja bantuan sosial kepada 30 kelompok masyarakat di



Tempat Pelelangan Ikan sebesar 50 Juta Rupiah per Kelompok, Pembentukan Unit Jasa Keuangan Syariah pada 173 Koperasi Pondok Pesantren (KOPONTREN) di 4 Kabupaten di Madura, dan pengendalian KSP/USP-Koperasi untuk tidak beroperasi sebagai bank gelap (bank titil) melalui pembentukan Komisi Pengendalian Simpan Pinjam (KPSP) di 12 Kabupaten/Kota, Penyediaan skema bantuan modal bagi kelompok PKL berupa penyaluran belanja bantuan sosial kepada 38 kelompok PKL masing-masing 50 Juta Rupiah, dan Pemberdayaan Koperasi Karyawan sebagai Mitra Perusahaan, Pemberdayaan Kelompok Wisata, serta Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan.

Dalam rangka meningkatkan akses pasar bagi produk pertanian dan menekan margin/selisih harga produk pertanian ditingkat petani dengan harga ditingkat konsumen, maka pada bulan Juli 2010

Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah me"*launching*" Pasar Induk Agribisnis PUSPA AGRO yang berlokasi di Kecamatan Jemundo Kabupaten Sidoarjo, menempati tanah seluas 50 Ha, dengan Jumlah Kios/Los Pedagang sebanyak 1.418 kios, dan telah terisi sebanyak 990 pedagang/petani yang berasal dari berbagai Kabupaten/Kota di Jawa Timur atau sekitar 65 persen dari kemampuan daya tampung.

Nilai transaksi rata-rata per hari saat ini sekitar 2 Milyar 500 Juta, dengan jumlah pengunjung rata-rata sebanyak 7.000 orang/hari. Pada waktu hari libur jumlah pengunjung bisa mencapai 12.000 orang.

Sejak berdiri dan diresmikan hingga tahun 2011 ini Puspa Agro telah melakukan ekspor ke luar Jawa Timur, diantaranya ke Provinsi Kalsel, Kaltim, Sulsel, NTT, Maluku dan Papua.

Untuk melengkapi fasilitas yang ada pada tahun 2012 dan tahun mendatang di dalam kawasan PUSPA

AGRO akan dibangun Rumah Potong Hewan modern yang berstandar internasional, Laboratorium uji untuk menjamin kelayakan konsumsi, Gedung Lelang bertaraf Internasional dan Gedung *Irradiaton*.

Diharapkan penyediaan fasilitas ini dapat meningkatkan pelayanan dan standard kualitas produk yang dipasarkan.

Kita ketahui bersama bahwa untuk meningkatkan perekonomian suatu wilayah harus didukung oleh ketersediaan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur jalan mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam menunjang pertumbuhan perekonomian dan pengembangan wilayah di Jawa Timur.

Ketersediaan jaringan jalan yang terintegrasi dan andal, diharapkan dapat melayani masyarakat pengguna jalan dengan aman, nyaman dan lancar.

Sedangkan, untuk mendorong perekonomian Jawa

Timur, khususnya Wilayah Madura pada tahun 2011 telah dilakukan pengadaan tanah untuk jalan akses menuju Pelabuhan Laut Socah Madura.

Adapun, pencapaian kinerja Jalan Provinsi tahun 2011 yaitu kondisi Jalan Mantap sepanjang 1.376,28 km, dan kondisi Jalan Tidak Mantap sepanjang 384,63 km, sehingga ada kenaikan prosentase Jalan Mantap bila dibandingkan tahun 2010 sebesar 77,73 persen.

Pembangunan Infrastruktur Perhubungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi antara lain Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Paciran di Lamongan, Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Ketapang, Pembangunan Pelabuhan Laut Tanjung Tembaga Probolinggo, Pembangunan Pelabuhan Laut Brondong Lamongan, Pembangunan Pelabuhan Laut BOOM PWI Banyuwangi, Pengembangan Bandara Udara Abdul Rahman Saleh Malang serta

Pembangunan *Double Track* Kereta Api Bojonegoro-Surabaya.

Sementara itu, keberlanjutan pembangunan ekonomi di Jawa Timur salah satunya juga mempertimbangkan kualitas lingkungan hidup. Kebijakan lingkungan hidup dilaksanakan dengan mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan.

Perkembangan membaiknya lingkungan di Jawa Timur ditunjukkan dengan semakin menurunnya indikator BOD dan COD yang menunjukkan kualitas air DAS Brantas baik Hulu, Tengah maupun Hilir.

Penurunan pencemaran air dilihat berdasarkan data hasil pengujian kualitas air DAS Brantas Hilir tahun 2011 untuk indikator BOD sebesar 3,96 mg/l menurun dibanding tahun 2010 sebesar 4,60 mg/l. Untuk indikator COD tahun 2011 sebesar 10,71 mg/l turun dibandingkan tahun 2010 sebesar 12,10 mg/l.

Kemudian, DAS Brantas Tengah tahun 2011 untuk BOD sebesar 3,89 mg/l turun dibanding tahun 2010 sebesar 5,54 mg/l, dan untuk COD tahun 2011 sebesar 12,39 mg/l menurun dibanding tahun 2010 sebesar 15,40 mg/l. Kemudian, DAS Brantas Hilir tahun 2011 untuk BOD sebesar 5,38 mg/l menurun dibanding tahun 2010 sebesar 6,21 mg/l dan untuk COD sebesar 23,30 mg/l pada tahun 2011 turun dibanding tahun 2010 sebesar 26,33 mg/l. Dengan hasil ini kedepan perhatian terhadap lingkungan hidup di Jawa Timur akan ditingkatkan lebih serius lagi.

***Sidang Dewan dan Hadirin Yang Terhormat,***

Indikator kinerja utama berikutnya adalah:

**KEEMPAT, INDEKS DISPARITAS WILAYAH**

Kesenjangan pembangunan antar wilayah merupakan sebuah kondisi yang dapat dilihat dari

berbagai perbedaan tingkat kesejahteraan dan perkembangan ekonomi antar wilayah.

Permasalahan kesenjangan dalam pembangunan masih didominasi oleh permasalahan kemiskinan, pendidikan dan kesehatan, serta rendahnya akses masyarakat pedesaan, wilayah terpencil, perbatasan dan wilayah tertinggal terhadap sarana dan prasarana sosial ekonomi.

Masalah kesenjangan pembangunan di Pedesaan dan wilayah terpencil Jawa Timur tidak lepas dari tinjauan 3 (tiga) aspek, yaitu dari Aspek Ekonomi (akses masyarakat pedesaan), Aspek Infrastruktur (akses masyarakat pedesaan terhadap pusat-pusat pertumbuhan) dan Aspek SDM (akses terhadap sumberdaya modal dan pasar masyarakat pedesaan terhadap sarana pendidikan).

Sedangkan, kesenjangan pembangunan antar wilayah di Jawa Timur dapat didasarkan pada 3 (tiga)

aspek tinjauan, yaitu tinjauan Aspek Ekonomi, Infrastruktur dan SDM.

1. Tinjauan aspek ekonomi, kesenjangan yang terjadi dapat diukur berdasarkan angka pendapatan perkapita dan pertumbuhan ekonomi masing-masing kabupaten/kota. Pengembangan kegiatan perekonomian pada masing-masing kabupaten/kota akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota.

Daerah seperti Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kota Malang, Kota Mojokerto yang berada di Wilayah Jawa Timur Bagian Utara memiliki kecenderungan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang lebih besar bila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Wilayah Jawa Timur Bagian Selatan.

2. Tinjauan aspek infrastruktur, dapat dinilai dari peran dan fungsi Kota Surabaya dan sekitarnya



sebagai pusat pengembangan di Provinsi Jawa Timur yang memiliki daya tarik kegiatan yang sangat besar, sehingga sebagian besar kegiatan pembangunan yang ada berpusat di Kota Surabaya dan sekitarnya (*primacy* Kota Surabaya).

Fungsi kota Surabaya sebagai pusat pengembangan wilayah juga menyebabkan terpusatnya pengembangan infrastruktur pada wilayah utara dibandingkan dengan wilayah selatan. Kondisi tersebut, menyebabkan terjadinya kecenderungan ketimpangan pembangunan antara wilayah utara (Kota Surabaya dan sekitarnya) dan wilayah selatan.

Data yang menunjukkan adanya ketimpangan antara Wilayah Utara dan Selatan serta kepulauan adalah terkonsentrasinya infrastruktur strategis pendukung kegiatan ekonomi, seperti infrastruktur

transportasi dan infrastruktur penunjang kegiatan perkotaan. Persebaran infrastruktur Kota Surabaya sekitar 8 persen dari kepadatan infrastruktur Jawa Timur. Kemudian, Kabupaten Malang, Banyuwangi, Gresik dan Sumenep memiliki proporsi sekitar 4-5 persen.

Sedangkan, Kabupaten/kota lainnya hanya memiliki proporsi rata-rata antara 1-3 persen.

Konsentrasi perkembangan kawasan perkotaan telah menimbulkan kesenjangan antar wilayah yang cukup signifikan serta inefisiensi pelayanan prasarana dan sarana. Sekitar 67,08 persen fasilitas dan pembangunan Jawa Timur terkonsentrasi di koridor Surabaya-Malang.

3. Tinjauan aspek SDM, dapat dilihat dari nilai IPM masing-masing kabupaten/kota. Besaran angka IPM menurut wilayah kabupaten/kota sangat bervariasi. Ini tercermin dari makin besarnya

range antara angka IPM atau HDI tertinggi dan terendah.

Terdapat 7 kabupaten/kota dengan kategori sangat tinggi, di antaranya Kota Blitar, Kota Surabaya, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Madiun, Kabupaten Kediri dan Sidoarjo.

Capaian kinerja Indeks Disparitas Wilayah Jawa Timur dilihat dari Indeks Williamson selama 5 (lima) tahun terakhir meskipun mengalami fluktuatif, namun cukup membanggakan karena ada kecenderungan menurun. Sampai dengan akhir 2011, kinerja indeks Disparitas Wilayah turun dari 2010 sebesar 115,14 menjadi 112,53. Dengan fakta demikian, maka percepatan pertumbuhan ekonomi sejak 2009 yang tumbuh 5,01 persen, 2010 tumbuh 6,68 persen sampai dengan 2011 yang tumbuh 7,22 persen, diikuti oleh penurunan disparitas. Kedepan bersama

dengan DPRD, semakin kita percepat penurunan dispatitas wilayah di Jawa Timur.

Berdasarkan data PDRB Perkapita kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, dapat diketahui bahwa Kabupaten/Kota yang memiliki PDRB perkapita besar yaitu Kota Kediri, Wilayah Utara (Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo), dan Kota Malang. Sedangkan, Kabupaten/Kota yang memiliki nilai PDRB perkapita kecil ada di Wilayah Selatan (Pacitan, Trenggalek, Ponorogo), Tapal Kuda (Bondowoso, Jember), Madura (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep).

Kondisi kinerja perekonomian yang membaik dan dukungan pembangunan infrastruktur yang memadai berdampak *multiplier effect* telah dapat memberikan kontribusi terhadap penurunan indeks disparitas di Jawa Timur.

Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas yang sedang dan belum berkembang melalui dukungan pelayanan prasarana jalan terutama di wilayah Selatan Jawa Timur, Perdesaan, daerah terpencil atau terisolir telah dilaksanakan kegiatan pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS).

Pada Tahun 2011 karena keterbatasan anggaran yang ada pembangunan Jalan Lintas Selatan menggunakan "STRATEGI SKALA PRIORITAS" yaitu Pembangunan dengan melakukan pembukaan lahan dengan ROW – 40 meter pada lokasi yang telah siap/telah dibebaskan dengan prioritas pada ruas-ruas yang berfungsi menghubungkan antar Kabupaten dan memperbaiki kemiringan dan trase jalan pada lokasi yang telah dibuka, serta pembangunan jembatan secara selektif dengan efektif ruas jalan sepanjang 9,65 km dan pembangunan

jembatan sebanyak 7 (tujuh) jembatan pada 7 (tujuh) lokasi di ruas Jalan Lintas Selatan.

Selain itu, pembangunan infrastruktur perhubungan yang telah dilakukan terkait dengan upaya untuk mengurangi disparitas wilayah Selatan dan Kepulauan antara lain dilaksanakan pembangunan pelabuhan penyeberangan di P. Raas Kabupaten Sumenep, Pembangunan Pelabuhan Laut di P. Gilimandagin, P. Giliraja dan P. Bawean, serta pengembangan dan pembangunan Bandar Udara Blimbingsari di Kabupaten Banyuwangi dan Notohadinegoro di Kabupaten Jember, Bandar Udara di P. Bawean serta Pengembangan Bandar Udara Trunojoyo.

### ***Sidang Dewan Yang Terhormat,***

Indikator Kinerja Utama yang terakhir atau:

## **KELIMA**, INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

Kinerja pembangunan manusia yang diukur melalui IPM didasarkan atas kinerja komposit terdiri dari Indeks Pendidikan, Kesehatan maupun Daya Beli. Pada tahun 2011 yang dalam pengukurannya dilengkapi dengan Reduksi shortfall. Reduksi Shortfall adalah metodologi untuk mengukur kecepatan peningkatan pencapaian pembangunan manusia per tahun.

Selama periode 2007-2011 angka IPM di Jawa Timur secara umum menunjukkan kenaikan. Pada tahun 2007 nilainya 69,78, dan selanjutnya meningkat terus menjadi 70,38 (2008); 71,06 (2009); 71,62 (2010) dan pada tahun 2011 mencapai 72,15.

Selain itu, selama periode 2007-2010 apabila dilihat dari besaran reduksi *shortfall* sebesar 6,71.

Kedua besaran ini menunjukkan posisi yang cukup

tinggi pencapaian pembangunan manusia, dicerminkan oleh peningkatan IPM Jawa Timur dari tahun ke tahun, dan reduksi *shortfall* per tahun yang dibandingkan dengan reduksi *shortfall* Provinsi lain.

Capaian Reduksi *shortfall* Jawa Timur sebesar 6,71 pada tahun 2007-2010 ini merupakan capaian yang tertinggi untuk Jawa-Bali, termasuk bila dibandingkan dengan Provinsi Yogya sebesar 6,27 dan Provinsi Bali sebesar 5,99, Jawa Tengah sebesar 5,40 termasuk Provinsi Banten dengan capaian yang terendah sebesar 3,87.

Kenaikan besaran indikator IPM Jawa Timur dan *reduksi shortfall* selama 5 (lima) tahun terakhir ini, tidak terlepas dari adanya berbagai program yang digulirkan oleh pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, antara lain program di bidang kesehatan, pendidikan maupun ekonomi dan



peningkatan kualitas sarana prasarana masyarakat lainnya.

Peningkatan angka IPM Jawa Timur dilihat dari komponen pendidikan sebagai salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas manusia, kebijakan program pembangunan pendidikan di Jawa Timur tahun 2011 difokuskan pada: (1) penuntasan buta huruf, (2) pembangunan dan rehabilitasi bangunan sekolah, (3) Penuntasan Penyetaraan Pendidikan Diniyah dan Pesantren Salafiyah dengan Pendidikan Umum melalui pemberian bantuan siswa dan guru/ustadz.

Hal ini dapat dilihat dari Indeks Pendidikan Jawa Timur mengalami peningkatan tahun 2009 sebesar 74,53 terus meningkat menjadi sebesar 74,98 pada tahun 2010, dan di tahun 2011 meningkat lagi menjadi sebesar 75,54.

Pembangunan pendidikan di Provinsi Jawa Timur selama periode 2009–2011 telah berhasil meningkatkan akses dan kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang ditunjukkan dengan meningkatnya Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun dari sebesar 7,17 tahun pada tahun 2009 menjadi sebesar 8,1 tahun 2011 dan meningkatkan persentase Angka Melek Huruf (AMH) penduduk usia 15 tahun ke atas dari sebesar 86,97 persen pada tahun 2009 menjadi sebesar 89,23 persen pada tahun 2011. Pencapaian tersebut semakin diperkuat dengan adanya peningkatan angka partisipasi pendidikan pada semua jenjang pendidikan.

Peningkatan akses pendidikan juga diikuti dengan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang ditandai dengan meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK). Angka Partisipasi

Kasar (APK) Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau sederajat mengalami peningkatan dari 112,30 persen pada tahun 2009 menjadi sebesar 112,67 persen pada tahun 2011.

Hal yang sama juga terjadi pada Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau sederajat yang mengalami peningkatan cukup besar, dari 101,69 pada tahun 2009 menjadi sebesar 102,12 persen pada tahun 2011. Demikian pula dengan peningkatan APK Jenjang Pendidikan Menengah dari 71,43 persen pada tahun 2009 menjadi sebesar 73,78 persen pada tahun 2011.

Pencapaian penting lainnya adalah meningkatnya persentase angka kelulusan dan angka melanjutkan pendidikan pada semua jenjang pendidikan. Selama periode 2009 – 2011, angka kelulusan mengalami peningkatan dari 99,05 persen menjadi sebesar 99,45 persen untuk Jenjang SD,

kemudian untuk Jenjang SMP dari 98,01 persen menjadi sebesar 98,31 persen, serta untuk jenjang Sekolah Menengah Atas dari 97,05 persen menjadi sebesar 97,73 persen.

Salah satu upaya program untuk mengatasi masalah penyetaraan guna mengatasi buta huruf di Jawa Timur, Pemerintah Provinsi melaksanakan prioritas program melalui Kebijakan BOSDA-MADIN.

Sasaran program BOSDA-MADIN diwujudkan dalam bentuk bantuan dana yang disalurkan kepada lembaga Madrasah Diniyah di Pondok Pesantren dengan melaksanakan pendidikan setara dengan pendidikan dasar. Upaya tersebut bertujuan untuk mengatasi kesenjangan/perbedaan pendidikan dasar di Jawa Timur melalui proses penyetaraan pendidikan pondok pesantren setingkat pendidikan umum.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur melaksanakan program prioritas berupa BOSDA Madrasah Diniyah

(Madin) sejak tahun 2010. Madrasah Diniyah belum tersentuh program BOS Nasional, sehingga dengan program BOSDA Madrasah Diniyah (Madin) diharapkan dapat memperpendek tingkat kesenjangan antara pendidikan formal dan Madrasah Diniyah (non formal).

Program ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2010 dan tahun 2011 sudah terealisasi sebanyak 1 Juta 215 Ribu 84 siswa, terdiri dari Fasilitas Pengembangan pendidikan yang berkaitan dengan masalah pembangunan, berupa Bantuan beasiswa bagi 997 Ribu 517 siswa Madrasah Diniyah Ula, 5.318 siswa Paket A, dan 2.773 siswa Paket A Pontren dengan nilai bantuan sebesar Rp.15.000/siswa/bulan serta 185 Ribu 486 siswa Madrasah Diniyah Wustho, 16 Ribu 286 siswa Paket B, dan 7.704 siswa Paket B Pontren dengan nilai bantuan sebesar Rp.25.000/siswa/bulan.

Sedangkan, bantuan untuk Guru sejumlah 84 Ribu 190 Orang meliputi pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidikan dan tenaga kependidikan yaitu berupa bantuan bagi 31 Ribu 82 orang Ustadz Madin Ula dan 5 Ribu 303 Ustadz Madin Wustho masing-masing sebesar Rp.300.000/bulan/guru-ustadz.

Selain itu, bantuan juga diperuntukan bagi Guru Swasta SD/MI/SDLB/Salafiyah Ula/SMP/MTs/ SMPLB/ Salafiyah Wustho/SMP Satu Atap sebanyak 6 Ribu 469 orang Ustadz Salafiyah Ula dan Salafiyah Wustho serta 41 Ribu 336 orang guru-guru yang mengajar di berbagai jenjang sekolah Swasta di Jawa Timur dengan nilai bantuan sebesar Rp.300.000/guru/bulan.

Berikutnya, komponen kesehatan merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi dan memiliki peran penting dalam upaya

penanggulangan kemiskinan. Pencapaian status kesehatan dan gizi masyarakat merupakan hasil kinerja seluruh komponen sistem kesehatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah serta berbagai komponen masyarakat.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dilihat dari komponen Indeks Harapan Hidup (kesehatan) tahun 2009 s/d 2011 terus mengalami peningkatan dari sebesar 73,92 menjadi 74,34 dan 74,68.

Peningkatan ini menunjukkan bahwa dalam sistem kesehatan, kinerja pembangunan kesehatan dicapai melalui peningkatan upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, penguatan kualitas sumber daya manusia kesehatan, penyediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, penguatan manajemen dan informasi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Salah satu upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat adalah melalui upaya

mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kebijakan mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat ini dilakukan dengan cara membentuk PONKESDES (Pondok Kesehatan Desa) yang merupakan perluasan fungsi dari POLINDES. Dengan peningkatan fungsi ini, warga masyarakat di daerah pedesaan yang sakit dan memerlukan pelayanan kesehatan, tidak perlu lagi keluar dari desa tempat tinggalnya untuk mencari sarana pelayanan kesehatan.

PONKESDES pada prinsipnya merupakan perluasan fungsi POLINDES, dimana jejaring Puskesmas yang mempunyai fungsi lebih luas lagi, yaitu memberikan pelayanan pertolongan persalinan dan memberikan pelayanan kesehatan dasar, dengan menempatkan tambahan tenaga seorang perawat .

Pada tahun 2010, dari 5.776 POLINDES, sebanyak 1.608 telah berubah menjadi PONKESDES.



Sedangkan, pada Tahun 2011 jumlah Ponkesdes sebanyak 2.334 buah atau naik 122 persen dari target kinerja yang ditetapkan yaitu sebanyak 1.904 buah Pokesdes pada tahun 2011.

Pembekalan terhadap 780 orang perawat serta bantuan Alat Kesehatan dan Mebelair terhadap 1.613 Ponkesdes telah terlaksana pada tahun 2011 ini. Diharapkan pada tahun 2014, semua POLINDES sudah berkembang menjadi PONKESDES. Harapannya agar masyarakat di pedesaan atau pelosok, tidak jauh-jauh lagi harus mendatangi PUSKESMAS untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Seiring menggeliatnya ekonomi di daerah yang ditunjukkan oleh membaiknya pertumbuhan ekonomi Jawa Timur, daya beli masyarakat Jawa Timur tahun 2010 mengalami peningkatan sehingga mampu mendorong peningkatan IPM. Bila ditinjau dari Indeks Daya Beli Jawa Timur terjadi peningkatan

secara signifikan dari sebesar 64,74 pada tahun 2009 meningkat menjadi sebesar 65,54 pada tahun 2010, sementara tahun 2011 mencapai sebesar 66,24.

Peningkatan Indeks Daya Beli masyarakat yang cukup signifikan dari tahun 2009-2011 tersebut, secara umum mencerminkan keberhasilan salah satu kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pencapaian sasaran Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, sedangkan kinerja Pemerintah Provinsi dalam memberdayakan Koperasi dan UKM telah dijelaskan sebelumnya.

***Pimpinan Dewan dan Segenap Anggota Dewan  
Yang Terhormat,***

**BAGIAN KEDUA,** mengenai Penghargaan Yang Diterima Pemerintah Provinsi Jawa Timur dari Presiden/Kementerian/Lembaga.

Secara umum, penghargaan merupakan bukti pengakuan publik terhadap keberhasilan kinerja yang dicapai secara berkualitas dan bermanfaat, baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun Masyarakat dalam upaya membangun image memiliki tingkat kompetensi terhadap suatu upaya melakukan perubahan. Namun, kami sadar bahwa penghargaan bukanlah menjadi tujuan utama bagi Pemerintah maupun Masyarakat Jawa Timur untuk mencapai keberhasilan dan meraih penghargaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Jawa Timur.

Hal yang lebih penting adalah apa yang sudah dilakukan oleh Pemerintah dengan seluruh jajaran bersama Stakeholder harus mampu mewujudkan perubahan riil yang sangat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya di tingkat paling bawah.

Dalam arti, memenuhi kebutuhan dasar dan

memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat yang dapat dirasakan langsung. Tentu saja *reward and punishment* yang diberikan memiliki makna tinggi dan harus diwujudkan dengan suatu pemberian apresiasi yang diakui oleh publik.

Terkait dengan apresiasi kinerja, Pemerintahan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2011 tetap konsisten menjalankan 9 Agenda Utama Pembangunan melalui 18 prioritas program. Implementasi terhadap 2 (dua) agenda pembangunan dilakukan dengan Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan terutama bagi masyarakat miskin maupun Meningkatkan kualitas kesalehan sosial demi terjaganya harmonisasi merupakan kebutuhan dasar dan vital bagi masyarakat Jawa Timur.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur memahami bahwa dari jumlah penduduk di beberapa daerah yang telah menyelesaikan pendidikannya, masih

terdapat warga masyarakat yang belum mengenyam pendidikan wajib belajar 12 tahun karena keterbatasan kuota daya tampung di tingkat pendidikan umum.

Melihat permasalahan dan potensi kultur religi masyarakat Jawa Timur yang dominan beragama Islam, Pemerintah Provinsi terus berupaya untuk dapat memenuhi kebutuhan pelayanan dasar khususnya pendidikan Islam setingkat Ulo-Wustho atau setara dengan SD dan SLTP. Pembangunan pendidikan ini sekaligus juga bertujuan untuk memelihara kerukunan antar umat beragama di Jawa Timur.

Begitu pula dengan kondisi siswa yang memiliki kelainan dan potensi kecerdasan atau bakat istimewa, juga menjadi perhatian khusus Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk terus dikembangkan melalui pendidikan inklusif.

Syukur alhamdulillah, melalui perjuangan peningkatan pendidikan yang bersifat khusus ini, pada bulan Januari 2011 Pemerintah Pusat melalui Kementarian Agama telah memberikan apresiasi berupa “Penghargaan Amal Bhakti Bidang Pendidikan Agama Dan Keagamaan” kepada Pemerintah Provinsi dan Masyarakat Jawa Timur, atas perhatian yang ditujukan terhadap pendidikan Islam yang berdampak dapat meningkatkan kerukunan antar umat beragama di Jawa Timur. Selain itu, pada bulan September 2011 juga menerima apresiasi penghargaan dari Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional yang berupa “Penghargaan Anugerah Pendidikan Inklusif”.

Melihat kemiskinan sebagai salah satu masalah utama di Jawa Timur, Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2011 terus melaksanakan alternatif-alternatif pemecahan untuk dapat mewujudkan

target pencapaian visi dan misi Jawa Timur dalam mensejahterakan wong cilik.

Alternatif kebijakan lain Pemerintah Provinsi Jawa Timur dilakukan dengan mengimplementasikan kebijakan program mobilitas penduduk melalui transmigrasi ke luar Pulau Jawa. Program transmigrasi ini merupakan alternatif upaya dalam melaksanakan agenda utama pembangunan Jawa Timur yang kedua yaitu Memperluas lapangan kerja, meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan, memberdayakan ekonomi rakyat, terutama wong cilik, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Diluar perkiraan, program mobilitas penduduk melalui transmigrasi ini, mendapat apresiasi dari Pemerintah (Pusat) berupa "*Transmigrasi Award*" yang diterima pada bulan Desember 2011.

Atensi dalam bentuk penghargaan dari Pemerintah (Pusat), ini mencerminkan bahwa strategi kebijakan pembangunan Jawa Timur tahun 2009-2014 dengan sasaran program *Pro Poor* dan *Pro Job* dinilai telah memberikan kontribusi dan dukungan yang sangat berarti terhadap kebijakan prioritas pembangunan nasional yaitu Pro Rakyat.

Pada kesempatan lain Pemerintah Pusat melalui Kementerian Koperasi dan UKM juga mengapresiasi wujud implementasi terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam hal “Memberdayakan Ekonomi Rakyat” sebagai implementasi terhadap agenda utama pembangunan yang kedua yaitu “Memperluas lapangan kerja, meningkatkan efektifitas penanggulangan kemiskinan, memberdayakan ekonomi rakyat, terutama wong cilik dan meningkatkan kesejahteraan rakyat” serta agenda utama pembangunan yang ketujuh yaitu



“Meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan, serta terjaminnya kesetaraan gender, dan meningkatkan peran pemuda, serta mengembangkan dan memasyarakatkan olah raga”.

Apresiasi yang begitu besar dari Pemerintah Pusat terhadap kebijakan bidang perkoperasian di Jawa Timur ini nampak dari 4 penghargaan yang diberikan pada bulan Pebruari 2011 berupa “Penghargaan Bidang Pengembangan dan Penggerak Kewirausahaan” sebagai provinsi penggerak kewirausahaan di daerah, kemudian pada bulan Juli 2011 berupa “Penghargaan Sebagai Provinsi Penggerak Koperasi Tingkat Nasional Berupa Paramadhana Utama Nugraha Koperasi” sebagai Provinsi Penggerak Koperasi Tingkat Nasional.

Selanjutnya, pada bulan Agustus berupa “Penghargaan Bintang Mahaputra Utama” karena dinilai layak dan berhasil dalam pembangunan dan

pengembangan koperasi di Provinsi. Dan di akhir tahun bulan Desember 2011 Pemerintah Pusat juga mengapresiasi Pemerintah Jawa Timur berupa “Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya Utama” karena dinilai berhasil melaksanakan strategi pengarusutamaan gender, kemajuan kaum wanita dan perlindungan anak.

Keempat penghargaan ini menjadi bukti riil bahwa peningkatan/pengembangan keberadaan dan peran serta wanita dalam proses pembangunan ekonomi daerah benar-benar mampu memberikan kontribusi yang cukup besar dalam upaya mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur hingga tumbuh realistis sebesar 7,22 persen melebihi rata-rata pertumbuhan ekonomi Nasional sebesar 6,50 persen.

Pertumbuhan Koperasi Wanita (KOPWAN) di Jawa Timur terbukti telah mampu mendongkrak

aktivitas sektor riil sekaligus menciptakan kemandirian sosial dan ekonomi masyarakat Jawa Timur. Disamping itu, tumbuhnya koperasi juga dapat menyerap tenaga kerja baru/pengangguran di tingkat gender menjadi sumber daya kreatif dan berpenghasilan untuk meningkatkan kesejahteraan serta merekonsiliasi jumlah kemiskinan di daerah.

Disisi lain, kinerja sektor perdagangan Jawa Timur pada tahun 2011 juga sangat menggembirakan. Dilihat dari kontribusi ekspor Jawa Timur terhadap nasional berada pada posisi kedua dengan *share* sebesar 11 persen dari ekspor nasional. Sebagai bentuk penghargaan kepada eksportir Jawa Timur yang telah berprestasi secara nasional dalam menyumbangkan devisa, Pemerintah Pusat telah memberikan *Apresiasi* kepada 2 (dua) eksportir Jawa Timur melalui penganugerahan “PRIMANIYARTA 2011”, dengan kategori Eksportir Pembangun Merk

Global dan Eksportir Usaha Kecil Menengah. Penghargaan ini diserahkan oleh Presiden pada tanggal 19 Oktober 2011

Disamping itu, Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian juga memberikan penghargaan Upakarti kepada 3 lembaga/perusahaan yang dinilai berprestasi dalam melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan industri kecil dan menengah secara berkesinambungan.

Apresiasi ini diserahkan oleh bapak Presiden pada tanggal 5 Januari 2012. Tujuan dari penganugrahan Upakarti ini adalah untuk mendorong minat dan partisipasi di kalangan masyarakat luas, agar berperan secara aktif dalam kerangka penciptaan dan pengembangan wirausaha baru, peningkatan pemerataan kesempatan berusaha serta kesempatan kerja di seluruh wilayah Indonesia.

Pada periode tahun yang sama, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berterima kasih banyak kepada Pemerintah Pusat yang pada bulan Juni 2011 telah memberikan apresiasi berupa penghargaan “Satya Lencana Pembangunan”. Apresiasi ini sangat penting bagi Pemerintah Jawa Timur dan khususnya masyarakat Jawa Timur yang mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian dan secara ekonomi penghasilannya masih sangat rendah dan fluktuatif.

Penghargaan ini bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur merupakan wujud efektivitas kebijakan terhadap implementasi agenda utama pembangunan Jawa Timur yaitu Meningkatkan percepatan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, terutama melalui pengembangan agroindustri, agrobisnis, serta pembangunan dan perbaikan infrastruktur, terutama pertanian dan pedesaan. Apalagi kinerja sektor

pertanian selama 5 tahun terakhir belum mampu tumbuh signifikan. Hal ini terlihat masih rendahnya kontribusi sektor pertanian ditinjau dari pembentukan sektor PDRB Jawa Timur, khususnya kinerjanya dibawah sektor Perdagangan dan Industri.

Pemberian apresiasi dari Pusat ini kedepan harus tetap menjadi perhatian serius Pemerintah dan Masyarakat Jawa Timur untuk tetap menjaga dan mempertahankan status sebagai daerah lumbung pangan nasional.

***Segenap Anggota Dewan Yang Terhormat,***

Perlu kami informasikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan pembangunan daerah juga memperhatikan lingkungan sebagai konsekuensi untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dalam upaya mendukung kebijakan ini Pemerintah Provinsi

Jawa Timur melaksanakan agenda utama pembangunan yang keempat yaitu “Memelihara kualitas dan fungsi lingkungan hidup, serta Meningkatkan Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Alam, dan Penataan Ruang”, hasilnya cukup menggembirakan.

Hal ini terlihat dari apresiasi Pemerintah Pusat yang diberikan pada bulan Juli 2011 berupa “Penghargaan Kalpataru” serta “Penghargaan Penanaman Satu Miliar Pohon” di bulan Nopember 2011 kepada Pemerintah dan Masyarakat Jawa Timur.

Apresiasi ini membuktikan bahwa seruan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan benar-benar direspon dengan baik oleh seluruh stakeholder, sehingga Jawa Timur memiliki lingkungan hidup yang nyaman dan sehat serta dapat menjadi tempat yang layak ditinggali oleh masyarakat untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Pada waktu yang sama di bulan September 2011, Pemerintah Pusat juga mengapresiasi kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan memberikan penghargaan “Adi Upaya Puritama” katagori Pembina Pemerintah Kabupaten/Kota terbaik, dalam rangka Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Jawa Timur.

Selanjutnya, pada bulan Nopember 2011 Pemerintah Pusat juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Bidang Pemanfaatan Teknologi Informasi Kepemerintahan”. Apresiasi ini merupakan bukti riil bahwa agenda reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dilakukan melalui berbagai program/kegiatan diantaranya dengan penguatan kapasitas kelembagaan yaitu perbaikan pada sarana dan prasarana yang digunakan secara langsung guna



memperlancar aktivitas kerja pemerintahan secara keseluruhan.

Pemerintah Jawa Timur menyadari untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran organisasi pemerintahan sesuai yang diharapkan, harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai kebutuhan saat ini, artinya sarana dan prasarana perkantoran sebagai bagian dari sistem dan prosedur mengikuti perkembangan teknologi modern, sehingga upaya memberikan pelayanan publik dan mensejahterakan masyarakat dapat diwujudkan dengan baik.

Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik lainnya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur selaku badan publik telah merespon Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik dengan membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi (PPID), yang berkewajiban membuka akses informasi publik untuk masyarakat luas.

Tindak lanjut implementasi mengenai keterbukaan informasi publik ini mendapat respon positif dari Pemerintah Pusat sehingga pada bulan Nopember 2011 memberikan penghargaan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan predikat sebagai “Provinsi terbaik yang memiliki badan publik dalam hal keterbukaan informasi publik”.

Apresiasi ini memberikan pencerahan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk lebih mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional.

Dengan demikian, masyarakat Jawa Timur dapat mengetahui lebih banyak lagi informasi yang dibutuhkan, sekaligus turut aktif berperan dalam

mengawasi aktivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah seperti laporan keuangan daerah, proses pengadaan barang dan jasa, laporan capaian kinerja program pembangunan daerah dll.

Ketiga apresiasi ini sekaligus mencerminkan efektivitas pelaksanaan kebijakan melalui agenda utama pembangunan yaitu Mewujudkan percepatan reformasi birokrasi, dan meningkatkan pelayanan publik.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai wakil Pemerintah juga menerima penghargaan kategori Pembina Pemerintah Kabupaten/Kota terbaik. Hal ini menunjukkan bahwa peran Gubernur dalam menjalankan urusan Desentralisasi, Tugas Pembantuan maupun Tugas Umum Pemerintahan di Jawa Timur telah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan urusannya

melalui pendekatan secara terintegrasi, silmultan, sinergi, terpadu dan komprehensif.

Dengan adanya apresiasi Pemerintah Pusat terhadap hasil kinerja baik sebagai dampak kebijakan agenda utama pembangunan melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran Pemerintahan Daerah Provinsi, mengindikasikan adanya "*respect positive*" dari Pemerintah (Pusat) terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan sesuai dokumen perencanaan pembangunan, amanat peraturan perundangan serta amanah masyarakat Jawa Timur.

***Pimpinan Dewan dan Segenap Anggota Dewan  
Yang Terhormat,***

Demikian, Nota Pertanggungjawaban mengenai Penyampaian LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2011

yang dapat kami sampaikan secara singkat kepada Segenap Anggota Dewan Yang Terhormat. Selanjutnya mengenai laporan pertanggungjawaban kami selengkapnya dapat dicermati pada Buku Laporan Pertanggungjawaban yang telah disampaikan kepada Segenap Anggota Dewan Yang Terhormat beberapa waktu sebelum sidang paripurna ini berlangsung.

Terkait dengan capaian kinerja yang telah dicapai, Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tahun mendatang tentunya sangat membutuhkan masukan dan kritikan dari Segenap Anggota Dewan Yang Terhormat, khususnya terhadap kebijakan strategis dan prioritas pembangunan yang diarahkan pada upaya pencapaian visi dan misi Jawa Timur.

Dengan selesainya penyampaian Nota Pertanggungjawaban ini, tersirat bahwa kami selaku Gubernur telah menjalankan kewajiban pelaporan sesuai ketentuan yang diamanatkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007.

Berkaitan dengan pemenuhan kewajiban pelaporan tahunan, kami berharap semoga laporan pertanggungjawaban tahun 2011 ini setelah melalui pencermatan dan pembahasan internal oleh Segenap Anggota Dewan yang Terhormat dapat diterima secara keseluruhan, baik tanggapan yang berupa pertanyaan, masukan, koreksi, himbauan, harapan, pendapat maupun saran perbaikan yang konstruktif, akan kami rangkum dan disampaikan dalam Jawaban Eksekutif pada Sidang Paripurna Lanjutan mendatang.

Sekian, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kami atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Jawa Timur Tahun 2011. Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kehadiran dan perhatian dari seluruh Anggota Dewan Yang Terhormat, sehingga sidang paripurna pada hari ini dapat berjalan dengan lancar.

Pada kesempatan yang terakhir, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-

besarnya, apabila dalam penyampaian Nota Pertanggungjawaban tahun 2011, terdapat adanya kesalahan/kekeliruan baik mencakup substansi narasi maupun redaksional, sehingga kurang berkenan di hati Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Segenap Anggota Dewan Yang Terhormat.

***Akhirul khalam,  
Billaahi Taufik Wal Hidayah,  
Wassalamualaikum Warahmatullahi  
Wabarakatuh.***

Surabaya, 22 Maret 2012

**GUBERNUR JAWA TIMUR**

**Dr. H. SOEKARWO**